

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI

- Angka **inflasi tahunan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan I** (Jan – Mar) berturut-turut sebesar **1,49 %, 1,81 % dan 1,42 % (yoy)**.
- Untuk angka **inflasi bulanan** Provinsi Papua Barat Daya pada **triwulan I** (Jan – Mar) berturut-turut sebesar **0,13 %, -0,11 %, 0,37 % (yoy)**.
- Tingkat inflasi bulanan Provinsi Papua Barat Daya sebesar 0,37 % (mtm) pada Maret 2024, berbeda dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi.
- Inflasi tahunan **Maret** 2024 Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,42 % (yoy) atau **DI BAWAH** angka inflasi tahunan Nasional Maret 2024, sebesar 3,05 % (yoy).
- Secara bulanan, seluruh kabupaten/kota IHK di Provinsi Papua Barat Daya mengalami kenaikan angka inflasi dari bulan sebelumnya.
- Inflasi tahunan **Maret** 2024 **Kabupaten Sorong Selatan** berada di atas batas atas target inflasi nasional tahun 2024, yakni 3,85 % (yoy) dan juga mengalami peningkatan 0,7% dari bulan
- Inflasi m-to-m terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: **kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,63 persen**; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,28 persen; **kelompok transportasi 0,56 persen**; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; **kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,69 persen**, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami **penurunan indeks** adalah kelompok perumahan, air, Listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen.
- Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: **kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,54 persen**; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,06 persen; **kelompok transportasi sebesar 5,00 persen**; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,02; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,13 persen; kelompok **penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,65 persen**; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,04 persen. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok pendidikan sebesar 2,43 persen.
- **Komoditas** yang dominan memberikan **andil/sumbangan inflasi m-to-m** pada Maret 2024, antara lain: Beras, Ikan Kakap Merah, Sawi Hijau, Buncis dan Telur Ayam Ras.
- **Komoditas** yang memberikan **andil/sumbangan deflasi m-to-m**, antara lain: Tomat, Ikan Kembung, Ikan Tuna, Bawang Merah dan Cabai Rawit.
- **Komoditas** yang dominan memberikan **andil/sumbangan inflasi y-on-y** pada Maret 2024, antara lain: beras, ikan tuna, angkutan udara, ikan teri dan daging ayam ras.
- **Komoditas** yang memberikan **andil/sumbangan deflasi y-on-y**, antara lain: ikan layang/ikan benggol, ikan kembung/ikan gembung, tomat, ikan selar/ikan tude dan daun singkong.

PERKEMBANGAN HARGA BAPOKTING

- Pada periode triwulan I (Jan – Mar 2024), **komoditas yang selalu memberikan andil terhadap inflasi adalah Beras, Ikan Tuna dan Tarif Angkutan Udara.**
- Harga beras medium pada triwulan I rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,6 % hingga pada Maret 2024 sebesar Rp. 15.750/kg. Begitu juga dengan Beras Premium, yang mengalami perubahan harga sebesar 5,6 % sepanjang triwulan I menjadi Rp. 17.167/kg per Maret 2024.

RESIKO KE DEPAN

Dikhawatirkan apabila TPID kab/kota tidak melakukan langkah-langkah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di wilayah masing-masing maka angka inflasi di kab/kota akan meningkat seiring dengan akan meningkatnya permintaan barang dan jasa saat Hari Raya Idul Fitri 1445 H

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Memasuki HBKN, tentunya permintaan pasar secara nasional mengalami peningkatan konsumsi. Begitu pula dengan di daerah, Provinsi Papua Barat Daya terkait pasokan komoditas beras masih tergantung dengan pasokan dari Bulog Sorong, saat ini stok di Bulog Sorong tidak hanya mendapatkan penugasan mensuplay beras di kab/kota se Provinsi Papua Barat Daya, namun juga menjadi penyangga bagi Kab. Kaimana dan Manokwari.

Selain itu, dari 6.000-an ha lahan baku sawah, hanya sekitar 2.500an ha lahan yang ditanami dan belum optimal. Hal ini disebabkan karena petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan benih padi berkualitas untuk ditanam sehingga hasil panen yang tidak memenuhi kualitas, hal ini juga yang mengakibatkan berkurangnya jumlah petani padi di kab/kota di Provinsi Papua Barat Daya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pj. Gubernur dalam upaya pengendalian inflasi, mengeluarkan himbauan kepada Bupati/ Walikota se-Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan langkah-langkah menjaga ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di daerah menjelang HBKN Idul Fitri 1445 H tahun 2024. Upaya tersebut dikeluarkan dalam bentuk **Surat Himbauan Gubernur Nomor 500/133/GUB-PBD/2024 pada 3 April 2024 di Sorong.**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan I 2024, maka evaluasi terhadap kebijakan yang telah terlaksana adalah memastikan kepala daerah tingkat kab/kota menjalankan himbauan agar tidak terjadi kelangkaan komoditas di masyarakat, kemudian

strategi 4K yang sepanjang periode triwulan I yang telah dilaksanakan mendapatkan hasil yang baik dimana angka inflasi pada Maret 2024 baik bulanan dan tahunan masih terjaga, oleh karenanya capaian yang telah didapat tetap dijaga dengan tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah, agar inflasi dapat terus terkendali.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan kondisi pada triwulan I 2024, TPID Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan agar :

1. Melakukan peninjauan dan koordinasi terhadap penetapan kebijakan tarif daerah sesuai dengan arahan TPIN agar kebijakan yang diambil tidak berdampak pada peningkatan inflasi di daerah;
2. Melakukan sidak pasar dan operasi pasar saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.